

**ANALISA KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING OLEH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH

NIM. 200801039

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syalsha Dilla Advina Saragih
NIM : 200801039
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03 September 2002
Alamat : Marjanji, Kec. Sipispis, Prov. Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari, terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2024
Menyatakan,



Syalsha Dilla Advina Saragih

**ANALISA KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING OLEH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

**SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH
NIM. 200801039**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunagasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005**

Pembimbing II



**Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc
NIP. 197901072023211003**

**ANALISA KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING OLEH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSAM**

SKRIPSI

SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH
NIM. 200801039

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

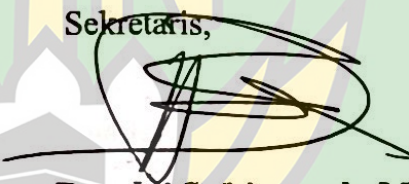
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

Sekretaris,



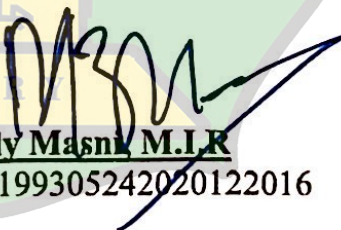
Renaldi Safriansyah, M.H.Sc, M.P.M
NIP.197901072023211003

Penguji I,



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP.198812072018032001

Penguji II,



Melly Masni, M.I.R
NIP.199305242020122016

Mengetahui,
Dekan

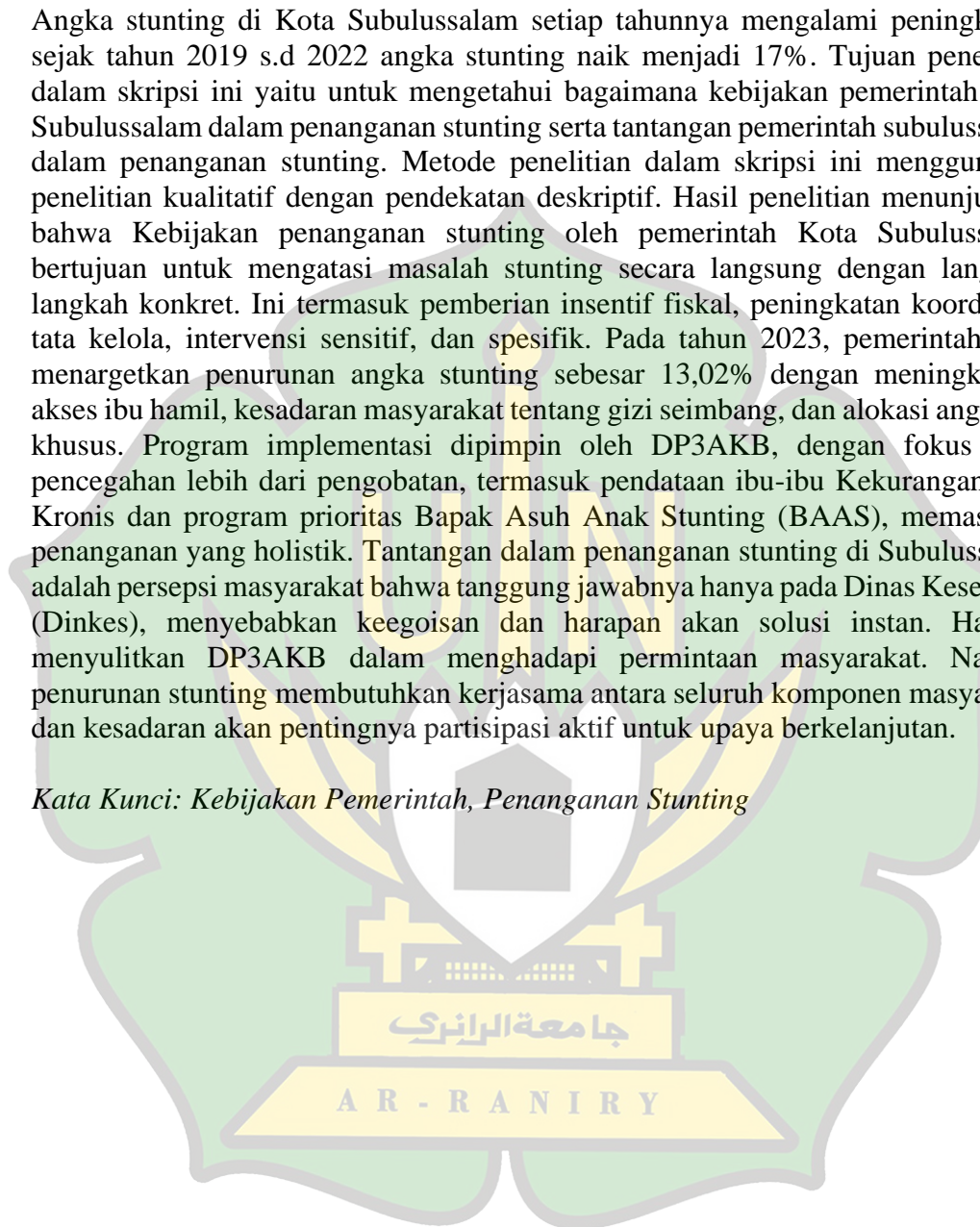


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Angka stunting di Kota Subulussalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, sejak tahun 2019 s.d 2022 angka stunting naik menjadi 17%. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting serta tantangan pemerintah subulussalam dalam penanganan stunting. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah Kota Subulussalam bertujuan untuk mengatasi masalah stunting secara langsung dengan langkah-langkah konkret. Ini termasuk pemberian insentif fiskal, peningkatan koordinasi, tata kelola, intervensi sensitif, dan spesifik. Pada tahun 2023, pemerintah kota menargetkan penurunan angka stunting sebesar 13,02% dengan meningkatkan akses ibu hamil, kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang, dan alokasi anggaran khusus. Program implementasi dipimpin oleh DP3AKB, dengan fokus pada pencegahan lebih dari pengobatan, termasuk pendataan ibu-ibu Kekurangan Gizi Kronis dan program prioritas Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), memastikan penanganan yang holistik. Tantangan dalam penanganan stunting di Subulussalam adalah persepsi masyarakat bahwa tanggung jawabnya hanya pada Dinas Kesehatan (Dinkes), menyebabkan keegoisan dan harapan akan solusi instan. Hal ini menyulitkan DP3AKB dalam menghadapi permintaan masyarakat. Namun, penurunan stunting membutuhkan kerjasama antara seluruh komponen masyarakat dan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif untuk upaya berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penanganan Stunting



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Analisa Program Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Kota Subulussalam”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Selama peneliti melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menyadari skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari ada begitu banyak sekali kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga peneliti berharap bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir dari kata, semoga dalam penyelesaian skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, selaku rector UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik. Dan Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A sebagai Penasehat Akademik (PA).

4. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Dr. Muji Mulia M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.,M.HSc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Kepada kedua orangtua tercinta khususnya mamak yang sudah membesarkan peneliti sendirian sampai berada di titik sekarang ini. Tidak lupa juga terimakasih kepada sosok ayah yang sudah lama saya rindukan namun tidak pernah saya rasakan kehadirannya. Terimakasih ayah yang sudah mendoakan putri kecilmu dari surga sana untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian peneliti bukan siapa siapa terimakasih karena telah membesarkan, mendoakan, menyemangati dan membantu baik dari segi material maupun non material.
6. Kepada ketiga saudara saya M. Iqbal Saragih yang senantiasa selalu mendukung dan mensupport peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Ivan Ryfkind Saragih sudah memberikan kepercayaan atas setiap langkah yang saya ambil. Terimakasih juga kepada saudari perempuan saya Syaqila Saragih yang selalu mendengarkan peneliti dalam segala hal yang membuat peneliti merasa sedih dan senang. juga kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk peneliti baik dari segi apapun.

7. Kepada kak Dedek Melda Imalia yang senantiasa mengajarkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Amarahmu adalah bentuk kasih sayang yang tidak akan aku dapatkan diluaran sana.
8. Kepada informan yang sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada peneliti selama proses peneliti berlangsung.
9. Segenap pihak yang hadir, membantu dan memberikan masukan serta kritik konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penggarapan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri.

Banda Aceh, 21 Februari 2024

جامعة الرانيري

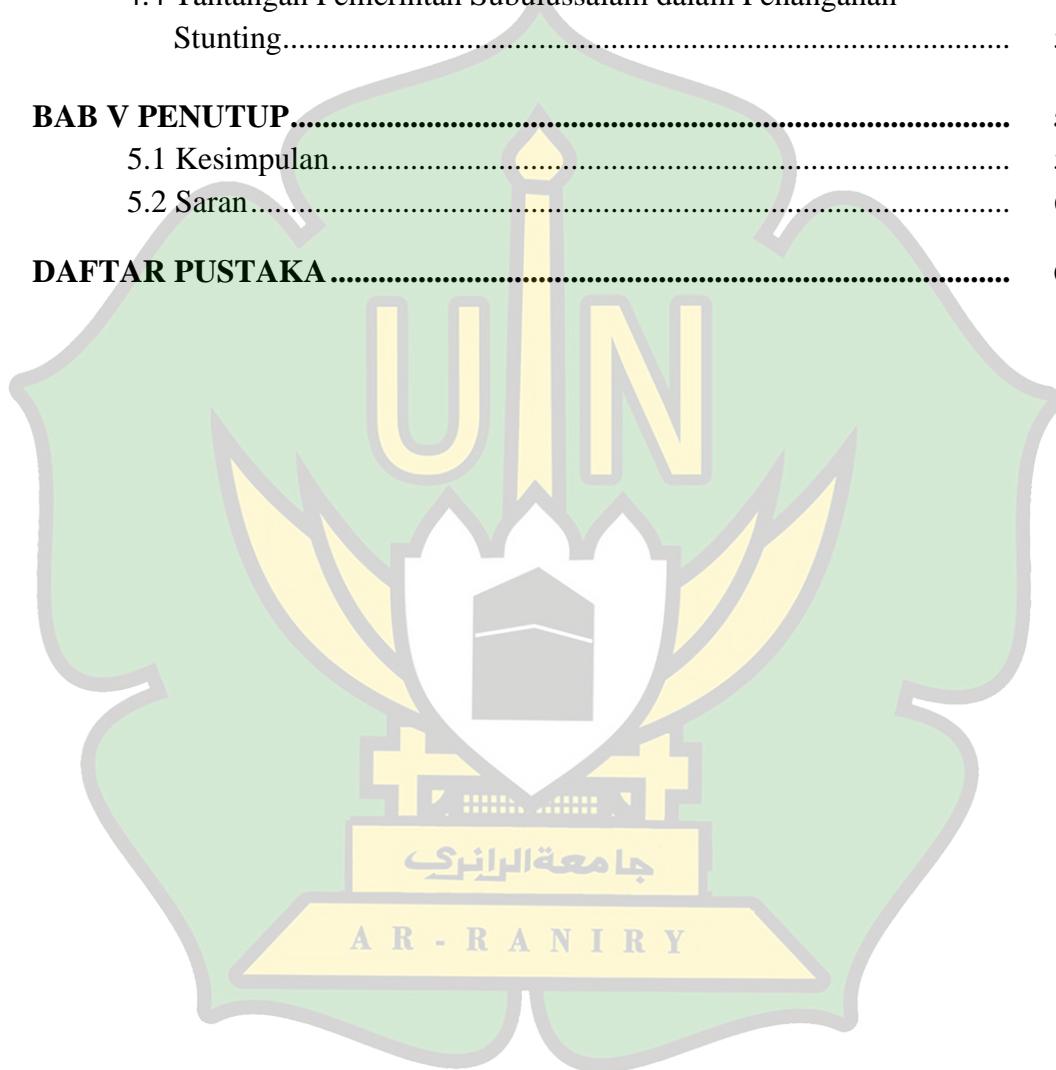
AR - RANIRY

Syalsha Dilla Advina Saragih
NIM. 200801039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pembahasan Penelitian yang Relevan	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Evaluasi Kebijakan	14
2.2.2 Dimensi Evaluasi Kebijakan	16
2.2.3 Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan	17
2.3 Faktor-Faktor Politik Penyebab Stunting	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Jenis dan Sumber Data	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	30
3.8 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Potret Sosial Budaya dan Kondisi Kesehatan Masyarakat Subulussalam.....	33
4.2 Fenomena Stunting di Kota Subulussalam Tahun 2019-2022	39
4.3 Kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam dalam Penanganan Stunting.....	43
4.4 Tantangan Pemerintah Subulussalam dalam Penanganan Stunting.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Stunting di Indonesia Tahun 2019-2022	2
Tabel 1.2 Angka Stunting Aceh pada Tahun 2019-2022.....	3
Tabel 1.3 Angka Stunting Kota Subulussalam Tahun 2019-2022.....	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Indikator Sarana Kesehatan	34
Gambar 2 Website Pemerintah Kota Subulussalam.....	36
Gambar 3 Berita Kota Subulussalam Rembug Stunting pada 26 Juni 2020....	41
Gambar 4 Berita Kota Subulussalam Rembug Stunting pada 18 Juli 2022.....	42
Gambar 5 Berita bappeda.subulussalamkota.go.id Review Kinerja Tahunan Stunting Kota Subulussalam Pada 28 Januari 2023	43
Gambar 6 Sebagai Bukti Pernyataan Diatas Pemerian Makanan 90 Hari yang Dihadiri Langsung oleh Ketua Satgas Stunting	51
Gambar 7 Berita Kota Subulussalam	52
Gambar 8 Singkilterkini.Net Subulussalam.....	54
Gambar 9 Serambinewa.com	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Lampiran III Surat Izin dari Wali Kota Subulussalam untuk melakukan Penelitian
- Lampiran IV Surat Izin dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran V Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mengatur berbagai aspek kesehatan. Promosi Kesehatan menekankan pentingnya promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan hidup sehat. Pencegahan Penyakit menetapkan berbagai langkah untuk mencegah penyakit, seperti imunisasi, pengendalian vektor penyakit, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Pelayanan Kesehatan mengatur penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan dasar di seluruh wilayah Indonesia. Sarana Kesehatan mengatur pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Tenaga Kesehatan mengatur standar pendidikan, kualifikasi, registrasi, dan lisensi bagi tenaga kesehatan serta menjaga profesionalisme dan etika dalam praktik kesehatan. Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular mengatur upaya pengawasan, deteksi dini, dan penanganan penyakit.¹

Masalah stunting di dunia bukan hanya masalah nutrisi dan gizi saja namun juga terkait dengan hubungan antara anak dan orang tua, perilaku hidup keluarga, dan pemenuhan akses ke air bersih, sanitasi dan jamban, pangan, dan kemiskinan adalah kebutuhan dasar manusia. Pendapat umum bahwa gizi buruk atau

¹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kekurangan gizi menyebabkan stunting sudah tidak relevan lagi.² Pendapat umum menjelaskan bahwa penyebab stunting bukanlah kekurangan gizi buruk saja namun banyak beberapa masalah stunting seperti yang sudah dijelaskan diatas. Indonesia berada pada peringkat 27 dari 154 negara di dunia pada tahun 2019, pada tahun 2020 pada peringkat ke 22, pada tahun 2021 pada peringkat ke 25, dan pada tahun 2022 peringkat ke 23.³ Secara global Indonesia masih menduduki angka tertinggi untuk stunting.

Tabel 1.1 Angka Stunting di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Presentase
2019	27,67%
2020	26,92%
2021	24,4%
2022	21,6%

Sumber: SSGI

Masalah stunting di Indonesia ialah gizi buruk pada ibu dan anak serta kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum hamil, selama kehamilan, dan pada 1000 hari pertama kehidupan anak, karena dapat menghambat pertumbuhan anak. Dengan ini menyebabkan terjadinya peningkatan tingginya angka stunting di Indonesia. Masalah ekonomi juga berperan penting terhadap kemaksimalan gizi anak. Karena kebanyakan yang terjadi kepada keluarga stunting rendahnya pendapatan sehingga memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi, sehingga anak-anak mereka tidak mendapatkan asupan yang cukup.⁴ Aceh berada pada peringkat ke 5 (lima) tahun 2019. Diikuti pada tahun 2020 berada pada peringkat

² Hardiyanto Rahman, Tahun 2023 *UPAYA PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten*

³ <https://www.kemendiknas.go.id/perlu-terobosan-dan-intervensi-tepat-sasaran-lintas-sektor-untuk-atasi-stunting>

⁴ Tri Rini Puji Lestari, tahun 2023 *Stunting di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya*

ke 4 (empat). Selanjutnya pada tahun 2021 berada pada peringkat ke 3(tiga). Terakhir pada tahun 2022 berada pada peringkat ke 5 (lima).

Tabel 1.2 Angka Stunting Aceh pada tahun 2019-2022

Tahun	Presentase
2019	34,18%
2020	33,01%
2021	31,4%
2022	31,2%

Sumber: SSGI

Penyebab stunting di Provinsi Aceh yaitu pengangguran sangat berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga seperti pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi dikarenakan ketidakmampuan untuk membeli makanan tersebut. Kekurangan gizi sering kali menjadi bagian yang berpengaruh terhadap pola makan yang mana kesehatan anak tergantung dengan asupan gizi anak tersebut.⁵ Aceh sejak tahun 2013-2021 selalu berada di peringkat lima besar nasional daerah paling tinggi angka stunting. Angka stunting kota subulussalam pada tahun 2019 berada pada posisi pertama dilanjut pada tahun 2020 berada pada posisi ketiga selanjutnya pada tahun 2021 berada pada posisi kedua dan terakhir pada tahun 2022 berada pada posisi pertama. Berdasarkan tingkat kabupaten/kota angka stunting di Kota Subulussalam selalu menjadi angka 3 tertinggi di Provinsi Aceh.

Permasalahan stunting di Kota Subulussalam yaitu kurangnya kurangnya edukasi terhadap ibu, tidak mau mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota subulussalam, memberikan makanan sembarangan terhadap anak dan faktor lingkungan minim literasi.⁶

⁵ Raisuli Ramadhan, Tahun 2023 *Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh*

⁶ Wawancara Oleh Bapak DP3AKB Kota Subulussalam

Tabel 1.3 Angka Stunting kota Subulussalam Tahun 2019-2022

Tahun	Presentase
2019	30,96%
2020	30,98%
2021	41,8%
2022	47,9%

Sumber : SSGI

Faktor penyebab stunting di dunia kekurangan gizi yang dapat menghambat perkembangan anak, Infeksi dan penyakit seperti diare, malaria, dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan, Kondisi lingkungan yang tidak sehat, Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik, ketidakstabilan ekonomi dan pendidikan ibu yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap stunting.⁷ Faktor Penyebab stunting di Indonesia termasuk pekerjaan ibu, tinggi badan ayah dan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif. Di samping itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan ibu, pengetahuan tentang gizi, umur saat pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi, serta faktor genetik juga berkontribusi terhadap stunting.⁸

Faktor penyebab stunting di Aceh yaitu pengangguran, pengangguran sangat berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga seperti pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi dikarenakan ketidakmampuan untuk membeli makanan tersebut. Kekurangan gizi sering kali menjadi bagian yang berpengaruh terhadap pola makan yang mana kesehatan anak tergantung dengan asupan gizi anak tersebut.⁹

⁷ World Health Organization (WHO), UNICEF,

⁸ Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita

⁹ Raisuli Ramadhan, Tahun 2023 *Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh*

Selanjutnya faktor penyebab stunting di Kota Subulussalam antara lain rendahnya pendapatan rumah tangga, diare, salah satu dari kedua orang tuanya bertubuh pendek atau kata lain gen keturunan, gizi buruk, riwayat penyakit menular, dan kondisi sanitasi yang buruk. Selain itu, faktor lainnya adalah kemungkinan membuang air sembarangan dan masih banyak anak-anak yang tidak mau diimunisasi. Karena itu untuk menurunkan angka stunting di Kota Subulussalam perlu dilakukan peningkatan pendapatan rumah tangga, perbaikan sanitasi, peningkatan pola makan sehat, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan perilaku hidup sehat.¹⁰

Ternyata, setelah dianalisis dari faktor-faktor penyebab stunting mulai dari tingkat global hingga tingkat lokal di kabupaten/kota, faktor utama yang menjadi penyebab stunting adalah kurangnya akses terhadap gizi yang memadai dan lingkungan yang bersih. Ini termasuk kekurangan gizi, infeksi dan penyakit, kondisi lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan pendapatan rumah tangga yang rendah. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan ibu, pengetahuan tentang gizi, pola asuh, praktik pemberian ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, dan faktor genetik juga turut berperan dalam menyebabkan stunting. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi stunting harus difokuskan pada peningkatan akses terhadap gizi yang berkualitas, perbaikan lingkungan, pelayanan kesehatan yang merata, peningkatan pendapatan keluarga,

¹⁰ Wanda Lestari, Ani Margawati, M. Zen Rahfiluddin, Tahun 2014 *Faktor Risiko Stunting Pada Anak Umur 6-24 Bulan di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh*. Jurnal Gizi Indonesia.

dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup yang bersih.

Studi kasus penanganan stunting yang baik mungkin dapat merujuk pada kebijakan yang diambil pemerintah Aceh Jaya. Peraturan bupati Aceh Jaya Nomor 22 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan malnutrisi (stunting dan gizi akut). Merujuk pada perbup tersebut maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten aceh jaya adalah memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (PMT pabrikan dan pemberian makan tambahan berbahan pangan lokal) sesuai standar, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat termasuk memastikan ibu mengkonsumsi minimal 90 tablet tambah darah (TTD) selama kehamilan, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu dan, melindungi ibu hamil dari malaria, memastikan ibu mendapatkan ANC layanan terstandar dan berkualitas, termasuk pemeriksaan Hb rutin (skrining anemia) dan, memastikan ibu mendapatkan layanan konseling gizi selama kehamilan. Sehingga angka stunting kabupaten aceh jaya pada tahun 2022 mendapatkan peringkat terendah di provinsi aceh.¹¹

Sementara itu, merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 54 tahun 2023 yang mengenai percepatan penurunan stunting, Kota Subulussalam menetapkan kebijakan Bapak Asuh Anak Stunting yang setiap desa nya memiliki bapak asuh, Program ini menjadi prioritas di kota tersebut, di mana setiap desa telah menerima

¹¹ Peraturan Bupati kabupaten aceh jaya Nomor 22 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanggulangan malnutrisi (stunting dan gizi akut) terintegrasi kabupaten Ajech Jaya.

penanganan terkait stunting. Forkopimda, SKPK, dan muspika bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan anak-anak yang mengalami stunting. Dari total 82 desa, 58 desa telah tercakup dalam program ini. Para pejabat tinggi, termasuk walikota, wakil walikota, kapolres, dan dansim, turun langsung ke desa untuk mendampingi. Dari Januari hingga Desember 2023, terjadi penurunan angka stunting setelah penerapan program Bapak Asuh Anak Stunting yang melibatkan semua pihak terkait dalam pemerintahan.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas stunting adalah masalah yang serius yang harus diperhatikan oleh seluruh pemerintah yang terlibat. Maka peneliti mengangkat judul tentang “*Analisa Kebijakan Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Kota Subulussalam*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dalam menangani stunting?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting?

¹² Peraturan Walikota Kota subulussalam Nomor 54 tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dalam menangani stunting.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini pihak terkait dapat menjadi acuan dalam penerapan strategi.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman perihal stunting.
3. Bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi, rekomendasi, ataupun referensi khususnya Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait Stunting di Provinsi Aceh agar bertambahnya wawasan mahasiswa, serta mengetahui permasalahan bangsanya sendiri yang sampai saat ini masih belum selesai juga.
4. Bagi Peneliti, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh dari segi hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Jurnal yang ditulis oleh Dahlan Tampubolon, tahun 2020 di Universitas Riau Pekanbaru yang berjudul “Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif deskriptif yang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target pencapaian kinerja dinas kesehatan telah dimuat dalam perjanjian kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dan 2019. Pemerintah Provinsi Riau baru mengakomodir penanganan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD tahun 2014-2019. Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan dengan baik melalui strategi intervensi spesifik maupun sensitive. Koordinasi level Provinsi belum ditemukan adanya koordinasi lintas sector sehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.¹³

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian dan cara mengumpulkan data. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode

¹³ Dahlan Tampubolon, Tahun 2020 *Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi* Universitas Riau Pekanbaru.

penelitian mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif deskriptif yang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan FGD. Sedangkan persamaannya terletak pada metode kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Hardiyanto Rahman, Tahun 2023 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul “Upaya Penanganan Stunting di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten” tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika trend penelitian, trend penulisan dari disiplin keilmuan, Co-occurrence kata kunci penulis, upaya penanganan stunting, dan trend publikasi berdasarkan wilayah dengan sopus sebagai sumber database artikel. Metode penelitian yang digunakan adalah Vosviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 103 artikel yang diterbitkan dalam jurnal berkaitan dengan upaya penanganan stunting di Indonesia dengan Trend penulisan terbanyak pada tahun 2021 sejumlah 33 artikel. Selain itu trend penulisan dari disiplin keilmuan dominan berkaitan dengan kesehatan (medicine dan nursing) sebanyak 85 artikel. Adapun occurrence tertinggi yaitu “stunting” dengan 20 occurrences, kata kunci populer yaitu Indonesia, children, malnutrition dan sanitation. Didapatkan juga telah ada 12 kategori upaya penanganan stunting berhubungan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitive, dengan paling banyak dilakukan di wilayah Indonesia secara umum sebanyak 33 artikel dan pulau jawa sebanyak 29 artikel ilmiah.¹⁴

¹⁴ Hardiyanto Rahman, Tahun 2023 *Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten* Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi terletak pada metode penelitian. Sedangkan persamaannya menggunakan teori tentang stunting.

Jurnal yang ditulis oleh Liza Nurva, Tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting Studi Kasus di Kabupaten Brebes” tahun 2023, dilakukan oleh Liza Nurva Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dengan teori eksplorasi model implementasi kebijakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dari segi pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saling bekerja sama, namun banyak hambatan yang dialami membuat kebijakan ini belum mencapai tujuan dan untuk perbup tersebut perlu dilakukan revisi agar sesuai dengan Peraturan Presiden yang terbaru yaitu Perpres No. 72 tahun 2021.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi terletak pada rumusan masalahnya yaitu lebih memfokuskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani stunting dan tantangan yang dihadapi oleh

¹⁵ Liza Nurva, Tahun 2023 *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting; Studi kasus di Kabupaten Brebes* Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

pemerintah dalam penanganan stunting. Adapun persamaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang metode penelitian kualitatif, teori-teorinya juga mengangkat tentang kebijakan dan stunting.

Jurnal yang ditulis oleh Archda, Tahun 2019 di Universitas Bangka Belitung yang berjudul “Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hulu hilir upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun pada kenyataannya angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan stunting terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan stunting, isu stunting seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program

pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak yang segera tanpa menunggu apapun.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi terletak pada lokasi penelitiannya. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya yang sama-sama membahas tentang metode penelitian kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Anik Lestari, Tahun 2020 di Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Edukasi Kader dalam Upaya Pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat tertentu (para kader gizi kesehatan) dalam hal pencegahan stunting pada balita. Metode penelitian yang digunakan adalah Mix Metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa edukasi gizi kesehatan dengan sasaran kader PKK di wilayah Kecamatan Mondokan, Sreagen telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Para kader sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif mereka dalam memberikan pertanyaan saat narasumber menyampaikan materi. Selain itu, ketika dilakukan permainan “pencegahan stunting” dengan baik. Dari 20 pertanyaan yang diberikan, para kader berhasil menjawab dengan benar sebanyak 17 pertanyaan. Kegiatan edukasi ini perlu ditindak lanjuti dengan “pelatihan” dan “pendampingan”, karena jika hanya diberikan penyuluhan satu kali

¹⁶ Archda, Tahun 2019 *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia* University of Bangka Belitung.

saja dikhawatirkan para kader belum dapat menerapkan pengetahuan barunya dengan baik.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi terletak pada objek kajian, teknik penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaannya menggunakan teori-teori stunting.

2.2 Landasan Teori

Dengan adanya dasar teori, penelitian dapat diperkuat secara ilmiah untuk memastikan bahwa data dan hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat spekulatif. Lebih lanjut, teori membantu peneliti dalam memberikan makna terhadap fenomena atau gejala sosial yang diamati. Teori digunakan sebagai acuan atau pembanding untuk informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif, teori memiliki peran krusial sebagai penopang, memungkinkan peneliti untuk menggali data secara komprehensif. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

¹⁷ Anik Lestari, Tahun 2020 *Edukasi Kader Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁸

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut James Anderson dalam Winarno membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Fungsional

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Memfokuskan

Evaluasi yang berfokus memeriksa secara khusus kinerja suatu kebijakan atau program. Dengan penekanan mendalam pada tingkat kejujuran dalam

¹⁸ Aweq Ampung¹, Adam Idris², Achmad Djumlani³, Tahun 2015 *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Studi Di UPT Pendidikan Muara Bengkal)*

pelaksanaan program atau kebijakan mengacu pada sejauh mana proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan, prosedur, dan nilai-nilai etika yang ditetapkan.

c. Sistematis

Evaluasi kebijakan sistematis, kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.¹⁹

2.2.2 Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public

¹⁹ Ririn Mais, Tahun 2019 *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung*

- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

2.2.3 Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.²⁰

²⁰ Samsuri, Tahun 2019 *Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan Pembuatan Izin Lingkungan pada Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak*

2.3 Faktor-Faktor Politik Penyebab Stunting

Stunting adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor politik. Beberapa faktor politik yang dapat mempengaruhi penyebab stunting yaitu:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup berbagai aspek mulai dari anggaran hingga regulasinya. Seperti, kebijakan anggaran yang tidak memadai untuk sektor kesehatan dapat mengakibatkan kurangnya dana untuk program-program gizi, yaitu distribusi makanan tambahan untuk balita atau pendekatan nutrisi kritis untuk ibu hamil. Di sisi lain, regulasi yang lemah dalam hal pangan dan sanitasi bisa memburuk masalah stunting dengan memungkinkan kontaminasi makanan atau air minum, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi.

2. Stabilitas Politik

Stabilitas politik, ketidakstabilan politik, seperti konflik bersenjata atau pergolakan politik, dapat mengganggu infrastruktur kesehatan dan distribusi pangan. Dalam situasi konflik, fasilitas kesehatan sering kali rusak atau ditutup, dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi sulit. Distribusi pangan juga dapat terhambat karena gangguan dalam transportasi atau ketidakmampuan untuk memasok ke daerah-daerah yang terisolasi. Selain itu, perubahan kebijakan yang sering terjadi akibat perubahan pemerintahan juga dapat mengganggu kelangsungan program-program kesehatan dan gizi jangka panjang.

3. Korupsi

Korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kesehatan dan gizi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli suplemen gizi atau memperbaiki fasilitas kesehatan bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadi atau dialihkan ke proyek-proyek yang tidak berkaitan. Selain itu, korupsi juga dapat mempengaruhi distribusi pangan dengan memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap makanan dan menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil.

4. Kapasitas Institusi

Kapasitas institusi pemerintah, seperti Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Pangan dan Obat-obatan, sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program-program pencegahan stunting. Institusi yang kurang berkembang atau kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dapat menghambat efektivitas program-program tersebut. Kurangnya infrastruktur kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil juga dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan dan gizi yang memadai kepada masyarakat.

5. Prioritas Politik

Prioritas politik yang tidak memadai terhadap isu stunting dapat mengakibatkan kurangnya dukungan untuk program-program pencegahan stunting. Fokus yang lebih besar pada isu-isu politik atau ekonomi lainnya dapat mengalihkan perhatian dari masalah stunting, bahkan ketika dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat. Penting bagi pemimpin politik untuk mengakui pentingnya isu

stunting dan memberikan dukungan politik yang kuat untuk program-program pencegahan stunting.

6. Regulasi Pangan dan Sanitasi

Regulasi pangan dan sanitasi yang lemah dapat mencakup kurangnya standar kebersihan dalam proses produksi dan distribusi makanan, kurangnya pengawasan terhadap praktik sanitasi di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional atau restoran, dan kurangnya akses terhadap air bersih untuk keperluan sanitasi. Kontaminasi makanan dengan bakteri, virus, atau zat beracun dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang menghambat penyerapan nutrisi, sehingga berpotensi menyebabkan stunting pada anak-anak.

7. Distribusi Pangan

Distribusi pangan, gangguan dalam distribusi pangan dapat mencakup permasalahan seperti kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai, korupsi dalam rantai distribusi, atau ketidakstabilan politik yang mengganggu aliran barang. Dalam situasi konflik, misalnya, konvoi makanan sering kali menjadi sasaran serangan, menyebabkan kelangkaan pangan di daerah-daerah yang terisolasi. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak.

8. Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jarak geografis, biaya transportasi yang tinggi, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang berkualitas. Kurangnya petugas kesehatan yang terlatih juga dapat menyebabkan

layanan kesehatan yang tidak memadai. Dalam konteks stunting, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah gizi pada anak-anak sejak dini.

9. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kesehatan dan gizi bisa mencakup praktik korupsi dalam alokasi dana, penggunaan dana yang tidak efektif, atau kurangnya pelaporan dan pemantauan atas implementasi program-program kesehatan dan gizi. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sulit untuk mengetahui apakah dana yang dialokasikan untuk program pencegahan stunting benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

10. Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan, perubahan kebijakan yang sering terjadi akibat pergantian pemerintahan atau perubahan arah kebijakan bisa menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program-program kesehatan dan gizi. Misalnya, program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya dapat dihentikan atau diubah arahnya oleh pemerintahan yang baru, sehingga mengganggu kelangsungan program dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi yang konsisten.

11. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender, Ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap layanan kesehatan dan gizi bisa mencakup kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, terbatasnya pengetahuan

tentang gizi yang tepat bagi ibu hamil dan menyusui, atau adanya norma sosial yang menghambat perempuan untuk memutuskan pola makan dan perawatan kesehatan keluarga.

12. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi, kesetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan gizi dapat dipengaruhi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Keluarga dengan pendapatan rendah atau tinggal di daerah-daerah terpencil sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, sehingga lebih rentan terhadap stunting.

13. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program kesehatan dan gizi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi dan kesehatan anak, kurangnya kepercayaan terhadap layanan kesehatan, atau ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena faktor sosial atau ekonomi.

14. Pola Politik,

Pola politik yang memprioritaskan kepentingan tertentu daripada kepentingan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya untuk program-program kesehatan dan gizi. Misalnya, pengalokasian dana yang besar untuk proyek-proyek infrastruktur atau pertahanan militer bisa mengorbankan alokasi untuk program-program kesehatan dan gizi yang seharusnya menjadi prioritas.

15. Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan Politik, Kualitas kepemimpinan politik dapat memengaruhi prioritas kebijakan dan efektivitas implementasi program-program kesehatan dan gizi. Kepemimpinan politik yang kuat dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan pelaksanaan program pencegahan stunting, sementara kepemimpinan yang lemah atau tidak responsif terhadap masalah kesehatan dapat menghambat upaya pencegahan dan pengendalian stunting.²¹

Pada dasarnya, stunting merupakan hasil dari beragam faktor yang kompleks, termasuk di antaranya adalah faktor politik. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa pentingnya kebijakan politik dan stabilitas pemerintahan berdampak langsung pada kesehatan anak-anak dan masa depan mereka.

Sebagai contoh, ketika pemerintah tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program kesehatan dan gizi, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu sering kali menjadi korban. Hal ini sering terkait dengan praktik korupsi di dalam sistem pemerintahan yang menghasilkan pemborosan atau penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, prioritas politik yang tidak tepat juga bisa menyebabkan kurangnya dukungan terhadap upaya pencegahan stunting. Misalnya, dalam situasi konflik politik, infrastruktur kesehatan sering kali menjadi sasaran serangan, yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai.

²¹ Laporan Riset dari Lembaga-Lembaga Kesehatan seperti WHO (*World Health Organization*), UNICEF (*United Nations Children's Fund*), atau institusi riset kesehatan global dan nasional lainnya.

Tetapi, tantangan politik tidak berhenti di sana. Ketidaksetaraan gender, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan. Semua ini menambah kompleksitas dalam upaya pencegahan stunting dan menuntut pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak.

Penting untuk diingat bahwa stunting bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Hanya dengan komitmen politik yang kuat, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil analisis yang saya dapatkan dilapangan bahwa pemerintah atau lintas sektor saja mempunyai keegoisan dari masing-masing dinas. Keegoisan dari lintas sektor terkait dapat mempengaruhi program yang telah dilaksanakan. Keegoisan yang ditimbulkan berdampak negative terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Penting nya memahami hubungan antara faktor politik dan stunting sangatlah penting dalam konteks pembuatan kebijakan kesehatan yang efektif yaitu

Pertama, pemahaman mendalam tentang pengaruh kebijakan publik terhadap alokasi sumber daya sangat penting karena prioritas politik dan kepentingan politik dapat memengaruhi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program-program kesehatan, termasuk pencegahan stunting.

Kedua, kompleksitas interaksi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta, juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan kesehatan terkait stunting. Dinamika politik di antara pihak-pihak ini memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program-program tersebut.

Ketiga, penyusunan kebijakan yang berkelanjutan dalam menangani stunting memerlukan dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak. Kebijakan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan harus mencakup aspek-aspek medis, gizi, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keempat, menyelaraskan agenda politik dengan tujuan kesehatan dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan kesadaran dan aksi terkait dengan masalah stunting. Dengan melibatkan politisi dan partai politik dalam upaya pencegahan stunting, dapat dibangun dukungan yang lebih besar untuk program-program kesehatan terkait dan memperkuat komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan anak-anak. Dengan memahami dinamika politik yang mendasari masalah stunting, kita dapat merancang strategi kebijakan yang lebih kokoh dan holistik dalam upaya mengatasi masalah ini secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Penelitian kualitatif adalah yang memiliki karakteristik, yang data nya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah simbol-simbol atau bilangan. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam perselisihannya.²²

Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan atau situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan

²² Moleong, Tahun 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*

penghayatan (verstehen) dan dalam memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa penelitian itu sendiri.²³

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Subulussalam dalam menangani persoalan stunting, serta mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah terlibat dalam mengatasi masalah stunting dan bagaimana peran pemerintah melalui program yang sudah ditetapkan terkait penanganan stunting di Kota Subulussalam.²⁴

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Subulussalam yang merupakan salah kota yang berada di provinsi Aceh memiliki angka stunting cukup tinggi. Dalam 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai 2022 angka stunting di Kota subulussalam naik sebanyak 17%.

3.4 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti memerlukan partisipasi informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah jenis informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini

²³ Chitra, Tahun 2023 *Disabilitas dan Pemilu 2019 Di Aceh Besar*

²⁴ Imelda Natasya, Tahun 2023 *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir di Aceh Tamiang*

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Informan
1	Ketua Satgas DP3AKB (Ketua Percepatan Penurunan Stunting Kota Subulussalam)	1 orang
2	Kepala Dinas Pangan Kota subulussalam	1 orang
3	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	1 orang
4	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kota Subulussalam	1 orang
5	Orang Tua Pasien yang Memiliki Kekurangan Gizi Buruk	2 orang

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan diperhatikan berbagai kejadian, tindakan, peristiwa, dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci. Data primer guna mendukung hasil wawancara.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.²⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature bacaan yang

²⁵ Burhan Bugin, Tahun 2021 *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Ilmu Sosial Lainnya)*, hlm.143.

²⁶ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.143.

memiliki relevansi dengan kajian ini seperti jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode Pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui wawancara, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan melalui interaksi langsung. Wawancara yang mendalam menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara kualitatif dilakukan secara formal dengan menggunakan pedoman wawancara yang lebih fleksibel dari pada pertanyaan terstruktur yang kaku. Tujuan utama wawancara adalah untuk mencatat dan mentranskripsikan data serta menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan percakapan.

2. Observasi

Observasi kualitatif digunakan untuk mengamati kejadian alami dan mengikuti alur proses yang terjadi secara alami dalam kehidupan yang diamati. Observasi kualitatif semacam ini tidak terikat oleh pengukuran dan klasifikasi tanggapan yang terprediksi. Observasi kualitatif ini memiliki kebebasan untuk menggali konsep dan kategori-kategori dalam setiap peristiwa yang muncul, yang dianggap berasal dari subjek penelitian atau berdasarkan pengamatan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, keandalan temuan penelitian kualitatif dapat ditingkatkan jika digunakan atau melibatkan penelitian literatur yang relevan. Tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian kualitatif sebagian besar bergantung pada penggunaan dan pemanfaatan literatur yang tersedia.²⁷

3.7 Teknik pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik uji dependability yang melibatkan audit terhadap seluruh proses penelitian.²⁸ Peneliti memanfaatkan auditor independen (dosen pembimbing) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua aktivitas penelitian yang dilakukan, dari awal hingga akhir penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis

²⁷ Imelda Natasya, Tahun 2023 *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir di Aceh Tamiang*

²⁸ *Ibid*, hlm. 150

data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses dimana data yang telah diperoleh, diidentifikasi dan dikategorisasikan kemudian disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan tahapan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi akibat dan proporsi. Sedangkan verifikasi merupakan tahap untuk kebenaran kekokohan dan kecocokannya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang

telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan.²⁹



²⁹ Imam Gunawan, Tahun 2014 *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hlm. 210-211.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Potret Sosial Budaya dan Kondisi Kesehatan Masyarakat Subulussalam

Kultur budaya di Kota Subulussalam dalam tradisi pesta yaitu mangan beradat, mangan beradat itu akan ada tokoh tertentu yang berhadir dan dihadiri oleh sanak saudara untuk makan bersama-sama. Mangan beradat ini dapat membentuk kebiasaan dan respons terhadap kesehatan dengan mempromosikan pola makan sehat, memperkuat hubungan sosial, menyediakan platform informasi kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tradisi “mangan mangadat” bukan hanya elemen kunci dari warisan budaya dan identitas masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Subulussalam dengan memperkuat pola makan sehat, mempererat ikatan sosial, memberikan edukasi kesehatan, dan mendorong gaya hidup aktif.

Masyarakat Subulussalam menunjukkan solidaritas yang kuat, yang tercermin melalui praktik budaya dan nilai-nilai tradisional. Tradisi seperti pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, solidaritas komunitas, dan dukungan sosial yang berdampak positif pada kesejahteraan emosional dan psikologis. Dengan demikian, budaya lokal memainkan peran kunci dalam membangun identitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan melalui peningkatan ikatan antargenerasi, keluarga, dan komunitas.

Masyarakat Subulussalam menonjol karena nilai-nilai tradisional dan semangat kebersamaan yang kuat. Mereka mengutamakan solidaritas sosial, gotong royong, dan keharmonisan dalam hubungan antar warga. Tradisi Aceh tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun mereka juga terbuka terhadap pengaruh dari luar. Secara umum, mereka dikenal sebagai individu yang ramah dan hangat, tegas dan pemberani, siap menghadapi tantangan dengan sikap adaptif dan kolaboratif, sering kali bergotong royong untuk mengatasi masalah. Keagamaan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, tercermin dalam pelaksanaan praktik dan ritual keagamaan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam Telp./Fax.(0627)31903
SUBULUSSALAM

Lampiran. Permintaan Data Dukung untuk Penelitian Mahasiswa

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
I.1 Sarana Kesehatan							
1	Jumlah Rumah Sakit Umum	RS	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Khusus	RS	0	0	0	0	0
3	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas	1	1	1	1	1
4	Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	Puskesmas	6	6	6	7	7
5	Jumlah Puskesmas Keliling	Puskesmas keliling	0	0	0	0	0
6	Jumlah Puskesmas pembantu	Pustu	0	0	0	0	0
7	Jumlah Apotek	Apotek	13	14	15	14	23
7	RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1	%	100	100	100	100	100
I.2 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan							
8	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	%	87.5	156.7	67.8	67.8	113.4
9	Cakupan Kunjungan Rawat Inap	%	12.0	8.5	0.3	0.2	113.4
10	Angka kematian kasar/ <i>Gross Death Rate (GDR)</i> di RS	per 1,000 pasien keluar	12.3	7.7	17.0	19.3	20.9
11	Angka kematian murni/ <i>Nett Death Rate (NDR)</i> di RS	per 1,000 pasien keluar	4.6	4.9	6.2	5.9	5.3
12	<i>Bed Occupation Rate (BOR)</i> di RS	%	0.1	48.0	48.0	67.0	58.0
13	<i>Bed Turn Over (BTO)</i> di RS	Kali	20.1	195.7	66.8	70.1	61.0
14	<i>Turn of Interval (TOI)</i> di RS	Hari	18.1	1.0	2.0	1.8	2.0
15	<i>Average Length of Stay (ALOS)</i> di RS	Hari	3.4	0.5	2.5	2.5	2.0
16	Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial	%	79.2	79.2	79.2	100.0	100.0
II.3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)							
27	Jumlah Posyandu	Posyandu	114	116	120	120	115
28	Posyandu Aktif	%	7.9	72.4	83.3	70	47
29	Rasio posyandu per 100 balita	per 100 balita	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
30	Posbindu PTM	Posbindu PTM	74	82	82	83	82

Gambar 1 Data kualitas kesehatan masyarakat melalui indikator sarana kesehatan

Berdasarkan informasi diatas kualitas kesehatan masyarakat dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk indikator sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa indikator sarana kesehatan yang dapat memberikan gambaran tentang kualitas kesehatan masyarakat:

1. Jumlah dan Aksesibilitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Semakin banyak puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah, semakin baik akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

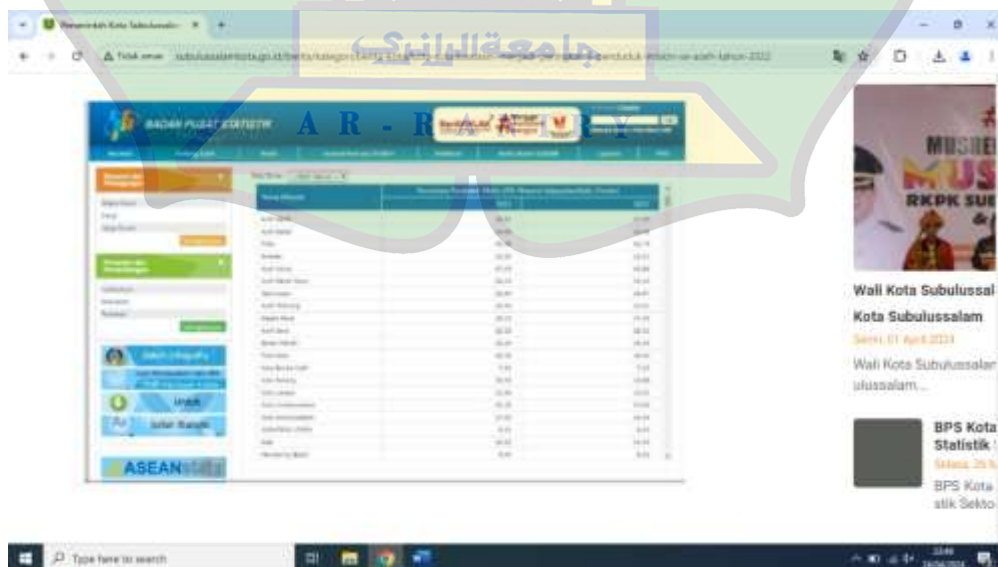
2. Pelayanan Kesehatan Preventif dan Promotif

Sarana kesehatan juga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan preventif dan promotif kepada masyarakat, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penyuluhan kesehatan. Kualitas pelayanan ini dapat diukur melalui cakupan dan efektivitas program-program preventif dan promotif yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan.

Sarana kesehatan berperan dalam meningkatkan mutu masyarakat di bidang kesehatan, maka kemudahan untuk menjangkau lokasi sarana kesehatan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi dan cerdas. Maka dari itu, segala bentuk hal yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sehat adalah dimulai dengan membangun sarana yang memadai. Menurut laporan dinas kesehatan kota subulussalam, Sarana kesehatan yang ada disana dari tahun 2019 sampai dengan

2023 sudah sangat baik. itu bisa dilihat dari adanya RSUD, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas non Rawat Inap dan Apotek. Sehingga akses masyarakat kota Subulussalam dalam bidang kesehatan lebih mudah dan terjangkau.

Karakteristik masyarakat Subulussalam, yang mencakup solidaritas sosial, kebersamaan, sikap adaptif, dan kolaboratif, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Melalui nilai-nilai ini, masyarakat dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan kesehatan, menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah kesehatan secara bersama-sama. Solidaritas sosial dan kebersamaan memperkuat ikatan sosial, sedangkan sikap adaptif memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan inovasi dan perubahan dalam bidang kesehatan. Dengan sikap kolaboratif, masyarakat dapat mengorganisir kegiatan bersama dan berbagi sumber daya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Ini semua berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan di kota Subulussalam.



Gambar 2 Website Pemerintah Kota Subulussalam

Informasi terkait dengan kondisi ekonomi di Kota Subulussalam, khususnya dalam konteks kemiskinan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut. Dapat dilihat dari website pemerintah subulussalam pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami penurunan sebesar 0,71 persen menjadi 16,94 persen, meskipun masih di atas rata-rata nasional. Penurunan ini bisa menjadi indikator positif bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam mulai memberikan dampak.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga melibatkan berbagai program, seperti penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, serta program bantuan sosial kepada kelompok rentan seperti warga miskin, anak terlantar, lansia, dan penyandang disabilitas. Program-program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap. Selain itu, langkah-langkah spesifik seperti program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS dengan mengaplikasikan e-kinerja juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menggeliatkan ekonomi lokal dengan memperbaiki daya beli masyarakat. Semua upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan di Kota Subulussalam dan memberikan dampak positif bagi penduduknya.

Kondisi ekonomi Kota Subulussalam menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2021 ke 2022, namun masih di atas rata-rata nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan, program bantuan sosial, dan program TPP untuk PNS menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan partisipasi angkatan kerja dan perubahan pola perekonomian.

Meskipun tingkat kemiskinan turun namun masih di atas rata-rata nasional, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial. Namun, tantangan masih ada terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandemi tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Perubahan pola perekonomian, termasuk penurunan partisipasi angkatan kerja, dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Penting bagi pemerintah Kota Subulussalam untuk tidak hanya memprioritaskan program ekonomi tetapi juga meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai langkah, seperti peningkatan infrastruktur kesehatan, pelatihan untuk tenaga kesehatan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat, dan memperluas cakupan program kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat yang terdampak. Integrasi antara program penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan program kesehatan juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, Kota Subulussalam dapat mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakatnya dengan cara yang lebih komprehensif.

4.2 Fenomena Stunting di Kota Subulussalam Tahun 2019-2022

Stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh bayi di seluruh dunia ini. Fenomena stunting di Kota Subulussalam menunjukkan kondisi yang tidak baik, dengan angka stunting yang tinggi. Kondisi stunting di Kota Subulussalam selalu berada pada tiga besar tertinggi di Aceh. Setiap tahunnya angka stunting di Kota Subulussalam selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 yaitu 30,96%, 2020 yaitu 30,98%, 2021 yaitu 41,8%, dan di 2022 47,9%.³⁰

Pada tahun 2019, terdapat masalah stunting di Kota Subulussalam yang menunjukkan bahwa sebagian anak mengalami keterhambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak karena kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Faktor-faktor yang berperan dalam menyebabkan stunting di wilayah tersebut meliputi rendahnya status sosial-ekonomi, pola makan yang tidak seimbang, akses terbatas terhadap gizi yang baik, serta masalah kesehatan dan sanitasi yang kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lintas sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan ekonomi, untuk mengatasi fenomena stunting. Kemungkinan pemerintah daerah bersama organisasi non-pemerintah telah melaksanakan program-program untuk meningkatkan status gizi anak-anak, memberikan edukasi tentang pentingnya gizi yang seimbang, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan memperbaiki infrastruktur sanitasi. Informasi lebih lanjut dari

³⁰ Nasrul Z, Sais Usman, Alfridsyah, tahun 2022 *Prevalensi dan faktor Determinan Kejadian Stunting Pada Siswa Sekolah dasar di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh*

sumber lokal atau pemerintah daerah dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang situasi stunting dan upaya yang dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun 2020-2022 fenomena stunting masih sama sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Faktor penyebab stunting di Kota Subulussalam yaitu kondisi lingkungan, pola asuh, pendidikan ibu, dan riwayat penyakit infeksi. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan situasi yang tidak baik menjadi permasalahan kesehatan yang dialami masyarakat kota subulussalam.

Berdasarkan hasil penelitian penulis sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya angka stunting di Kota Subulussalam menjadi prioritas pemerintah untuk fokus terhadap penurunan angka stunting tersebut. Setiap tahun yang menjadi permasalahan stunting di Kota Subulussalam masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pola asuh, pendidikan ibu, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak.

Untuk mengatasi masalah stunting, pemerintah Kota Subulussalam melalui Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) Kota Subulussalam menyelenggarakan riview kinerja tahunan stunting kota subulussalam. Walikota juga membuka rebug/musyawah, artinya berunding tentang situasi dan kondisi kota tersebut yaitu stunting tahun 2022. Adanya program yang dijalankan oleh pemerintah kota subulussalam agar semua pihak yang terlibat sadar akan pentingnya edukasi terkait stunting tersebut.



Gambar 3 Berita Kota Subulussalam Rembug Stunting pada 26 Juni 2020

Dalam informasi ini, Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian membuka acara Rembug Stunting Kegiatan Koordinasi Konvergensi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Penurunan Stunting Kota Subulussalam Tahun 2020. Menyatakan bahwa Kondisi stunting yang sangat mengkhawatirkan di Kota Subulussalam memerlukan respons serius dari semua pihak, tanpa terkecuali. Semua harus segera bertindak dan berupaya dengan sungguh-sungguh melalui sektor-sektor terkait untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, stunting di Kota Subulussalam.



Gambar 4 Berita Kota Subulussalam Rembug Stunting pada 18 Juli 2022

Dalam informasi tersebut, Walikota Subulussalam H. Affan Alfian menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Subulussalam sejahtera dan Islami, Pemerintah Kota Subulussalam terus melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satunya adalah masalah stunting, pada tahun 2021 berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia bahwa angka pre-valensi stunting Kota Subulussalam masih berada pada kategori tinggi yaitu 41,8% bahkan angka ini berada di atas angka stunting Provinsi Aceh 33,2% dan nasional dengan angka 24,4%. Sehingga Kota Subulussalam masih menjadi lokasi fokus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kabupaten Kota prioritas pencegahan dan penurunan stunting, ucapnya. harus ada komitmen bersama agar bisa segera menurunkan angka stunting di tahun 2023 sebesar 13,02%.



Gambar 5 Berita bappeda.subulussalamkota.go.id Review Kinerja Tahunan Stunting Kota subulussalam Pada 28 Januari 2023

Dalam informasi tersebut, Pemerintah Kota Subulussalam melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Subulussalam menyelenggarakan acara Review Kinerja Tahunan Stunting Kota Subulussalam. Acara dihadiri langsung oleh Ketua TPPS Kota Subulussalam, Drs. SALMAZA, M.AP. (mi). Acara ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72/2021 Pasal 21 ayat (2) yaitu "Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

4.3 Kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam dalam Penanganan *Stunting*

Sesuai peraturan Walikota Subulussalam Nomor 54 Tahun 2023 terkait percepatan penurunan stunting bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan 3 tipe dalam

mengukur kebijakan terhadap dinas-dinas yang terkait, yakni: (1) fungsional; (2) memfokuskan; (3) sistematis.

Dari ketiga tipe tersebut, ketiga tipe dapat mempengaruhi evaluasi sebuah kebijakan. Ketika informan dinas-dinas terkait melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui program-program yang sudah ada dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang terindikasi stunting.

1. Sistematis

Evaluasi kebijakan sistematis, kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan stunting yaitu, dinas kesehatan, dinas DP3AKB, dinas PU-PR, dinas Pendidikan, dinas pangan, dinas pertanian, dinas catatan sipil, dinas sosial, dinas kominfo, dinas DPMK, kemenag, dinas bappeda, dinas BPKKAD. Dari 13 pihak diatas dinas yang paling terlibat dalam penanganan stunting yaitu dinas bappeda, dinas kesehatan dan dinas DP3AKB.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Subulussalam terkait dengan penanganan stunting yaitu terkait kegiatan program penurunan stunting, intervensi gizi spesifik dan sensitif, rembuk stunting tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kampung. Seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang perencanaan dan pembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam.

“Perencanaan yang dilakukan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah stunting secara langsung yaitu pemberian insentif fiskal dan penekanan pada perencanaan yang mendukung koordinasi, tata kelola, intervensi sensitive, dan intervensi spesifik”³¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya dukungan perencanaan yang konkret, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga pendukung, pemerintah berharap dengan adanya penanganan stunting dapat diperbaiki dan program-program dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya perencanaan ini target yang diharapkan pemerintah bisa tercapai.

Alur perencanaan kebijakan meliputi analisis situasi, penetapan tujuan dan sasaran, pengembangan strategi dan kebijakan, perancangan program dan kegiatan, alokasi sumber daya, implementasi, monitoring dan evaluasi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang perencanaan dan pembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam.

“Mendata anak stunting, mengetahui faktor yang mempengaruhi stunting, memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemerintah kota subulussalam menargetkan untuk menurunkan angka stunting sebesar 13,02% pada tahun 2023. Meningkatkan akses ibu hamil, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik pola makan yang sehat, dan mengalokasikan anggaran untuk stunting”³²

Pernyataan ini menggambarkan pemerintah kota subulussalam menekankan bahwa penanganan stunting di Kota Subulussalam menjadi prioritas utama, yang harus didukung dengan langkah-langkah konkret. Para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, perlu mencari solusi atas faktor-faktor penyebab tingginya angka stunting serta menerapkan program yang efektif. Penting

³¹ Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan oembangunan sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam, 31 maret 2024

³² Wawancara dengan bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam, 8 april 2024

untuk memastikan alokasi dana yang memadai dan transparansi dalam pelaporan kegiatan terkait stunting. Keseriusan dan kerja sama semua pihak ditekankan untuk mencapai hasil yang nyata dalam penurunan angka stunting.

Adapun aturan perencanaan penanganan stunting di Kota Subulussalam dibagi dalam dua bagian yaitu peran dan tanggung jawab Kecamatan dan Desa. Adapun peran dan tanggung jawab Kecamatan yaitu melaksanakan koordinasi intervensi pencegahan stunting, melakukan review atas usulan rencana kerja anggaran desa, menyelenggarakan rapat koordinasi/rembuk stunting tingkat kecamatan, mendukung proses perencanaan dan penyelenggaraan berbasis data terkait penurunan stunting, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa terkait kegiatan penurunan stunting, melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan stunting tingkat desa, mendukung pemantauan dan verifikasi data yang dibutuhkan untuk penurunan stunting, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi hasil akhir penurunan stunting.

Sedangkan peran dan aturan tanggung jawab desa yaitu mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat, melakukan pemantauan keluarga berisiko stunting agar menerima dan memanfaatkan paket layanan dasar intervensi gizi prioritas bekerja sama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas puskesmas serta petugas keluarga berencana, menyiapkan dan membina kader pembangunan manusia yang terkait dengan pencegahan stunting, menyelenggarakan rapat koordinasi/rembuk stunting tingkat desa, melaksanakan program/kegiatan pencegahan stunting dengan

koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi hasil akhir penurunan stunting ke kecamatan.

Adapun struktur kerja perencanaan kebijakan stunting Kota Subulussalam yaitu:

- a. Memahami seluruh masalah stunting, termasuk faktor-faktor penyebabnya, prevalensinya, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- b. Siapa saja yang terlibat dalam upaya mengatasi stunting, sehingga kolaborasi dan koordinasi yang efektif dapat terbentuk di antara mereka.
- c. Menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mengatasi stunting, sehingga upaya tersebut dapat diarahkan dan dinilai secara objektif.
- d. Merumuskan rencana strategis yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah stunting, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti gizi, kesehatan, sanitasi, dan Pendidikan.
- e. Merancang program dan kegiatan yang spesifik untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengorganisasian.
- f. Membuat mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.
- g. Jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan, maka kebijakan dapat direvisi atau dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi stunting.

2. Fungsional

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Artinya kebijakan dan program yang dijalankan memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Hasil wawancara dengan ketua DP3AKB terkait implementasi perencanaan kebijakan.

“Perencanaan program implementasi yang dilakukan oleh DP3AKB lining sektor dari BKKBN Provinsi Aceh. Penyuluh-penyuluh lapangan DP3AKB bekerja mendata ibu-ibu Kekurangan Gizi Kronis sehingga bukan hanya anak stunting saja yang di data. Ketika hanya menaganani anak stunting saja tetapi melahirkan generasi yang stunting juga maka ini perlu juga di tanganin. Khusus dari DP3AKB untuk mencegah lebih baik dari pada mengobati”³³

Pernyataan ketua DP3AKB terkait perencanaan program penanganan stunting yaitu para petugas dalam lingkup DP3AKB mengadakan penyuluhan lapangan terkait dengan pendata ibu-ibu yang kekurangan gizi, tidak hanya stunting yang dijadikan sebagai topik utama melainkan penyakit kronis lainnya yang dapat menimbulkan stunting yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan keefektifan perencanaan penanganan stunting di Kota Subulussalam sangat baik dapat dilihat pada jumlah anak yang terkena stunting. Pada bulan januari 2023 terdapat 811 orang anak yang terindikasi stunting dan pada bulan desember terdapat 258 anak yang sembuh dari stunting.

³³ Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting, 15 januari 2024

Sejalan dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa efisiensi perencanaan program penanganan stunting di Kota Subulussalam berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun tidak semua anak sembuh dari stunting namun dinas yang terkait sudah berusaha sebaik mungkin untuk menurunkan jumlah anak yang terindikasi stunting.

3. Memfokuskan

Evaluasi yang berfokus memeriksa secara khusus kinerja suatu kebijakan atau program. Dengan penekanan mendalam pada tingkat kejujuran dalam pelaksanaan program atau kebijakan mengacu pada sejauh mana proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan, prosedur, dan nilai-nilai etika yang ditetapkan.

Hasil wawancara dengan dinas DP3AKB terkait dengan pemfokusan perencanaan program penanganan stunting di Kota Subulussalam:

“Program yang dijalankan oleh DP3AKB yang menjadi prioritas di Kota Subulussalam adalah Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) artinya setiap desa sudah mendapatkan penanganan”³⁴

Sesuai dengan pernyataan dinas DP3AKB tentang pemfokusan perencanaan penanganan stunting yang menjadi topik utama di Kota Subulussalam yaitu BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting). Sesuai dengan peraturan Presiden tahun 2021 No. 72 bahwasanya hari ini Kota Subulussalam merupakan kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting dimana hari ini dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh Khususnya Kota Subulussalam merupakan yang paling tertinggi stunting. Dalam

³⁴ Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting, 15 Januari 2024

hal ini pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas DP3AKB di Kota Subulussalam yaitu:

Pertama, mendata berapa jumlah anak stunting yang ada di Kota Subulussalam sehingga kita tahu mengatasinya. Ada yang mengawal dan mendampingi BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) mulai dari Forkopimda, SKPK, dan Muspika yang bertanggung jawab mengelola dan memantau sejauh mana anak stunting tersebut. Dari 82 Desa sudah 58 Desa ditangani. Mulai dari Bapak Walikota, Wakil Walikota, Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah turun ke Desa-desa. Dari bulan januari ke bulan desember dinas DP3AKB melihat ada penurunan terhadap anak yang terindikasi stunting tersebut.

Dinas DP3AKB memprogramkan dana desa yaitu pemberian makanan 90 hari kepada anak stunting jadi setiap hari DP3AKB memberikan makanan kepada anak stunting tersebut sekitar pukul 11:00. Pihak DP3AKB memberikan dan memantau melalui grup kemudian ada juga dari Dinkes memberikan makanan kudapan kepada ibu-ibu KEK (kekurangan gizi kronis), anak-anak stunting, dan anak-anak kurang gizi. Dan juga program tersebut berjalan selama 90 hari pada tahun 2023 dan juga akan dilakukan kembali pada tahun 2024 mendatang.





Gambar 6 Sebagai bukti pernyataan diatas pemerian makanan 90 hari yang dihadiri langsung oleh ketua satgas stunting

DP3AKB tidak hanya bekerja memberikan makanan, namun juga dari penyuluh DP3AKB setiap harinya melakukan pemberian edukasi kepada keluarga yang terindikasi dampak stunting. Karena stunting ini berpengaruh jadi pihak DP3AKB harus mengedukasi terkait dengan pentingnya pola makan dan hidup sehat. Selain itu, memberikan makanan serta mengedukasi kepada anak-anak atau keluarga stunting sehingga keluarga tersebut menjaga pola makan dan lingkungannya. Pola lingkungan harus bersih jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki gizi yang seimbang dan lingkungan bersih juga sangat diperlukan dan diperhatikan supaya terhindar dari penyakit.

Perilaku yang kurang sehat, adanya kumpulan sampah hasil memulung di lingkungan dan banjir yang terkadang mendekati permukiman memperparah keadaan yang ada. Sungai menjadi tempat untuk mandi cuci, buang air besar juga pembuangan sampak domestik dari rumah tangga. Pola tatanan rumah warga permukiman yang tidak teratur dan jenis bangunan non permanen digunakan sebagi

tempat tinggal. Ironisnya walaupun dengan kondisi yang sedemikian rupa warga permukiman masih tetap bertahan dan tinggal di permukiman. Hal ini karena adanya serangkaian kegiatan dalam mengolah dan menciptakan hubungan timbal Balik dengan lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya hal itu, menyebabkan juga terjadinya Perubahan-Perubahan tata ruang pada lingkungannya.



Gambar 7 Berita Kota Subulussalam

Dalam Informasi tersebut, acara pelaunchingan BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) pada maret 2023 yang menjadi fokus kebijakan dalam penanggulangan stunting. Ketua TP PKK Kota Subulussalam Hj. Mariani Harahap mengatakan pemerintah harus melaksanakan perannya dalam melakukan koordinasi lintas sektor, kerjasama antar pihak, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sampai kepada membantu tenaga kesehatan, dengan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Ia juga mengatakan Perhatian dan kependulian dari jajaran

pemerintah dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya, ujanya. Berkat komitmen serius dan kerja sama semua pihak dalam penanganan, pencegahan dan penyelesaian permasalahan stunting yang dilakukan melalui masalah kesehatan, sosialisasi, peningkatan gizi, pemantauan dan sebagainya angka stunting di Kota Subulussalam secara perlahan terus mengalami penurunan.

Salah satu fokus pemerintah Kota Subulussalam saat ini yakni memperhatikan anak-anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar.

Menurutnya ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, pertama, pola makan. Yaitu akses terhadap makanan baik dari segi jumlah maupun kualitas gizi harus seimbang. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan harus banyak mengonsumsi sumber protein dengan tetap mengonsumsi sayur dan buah. Kedua, pola asuh. Disini peran dari orang tua khususnya ibu sangat penting agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi ibu dan anaknya. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Faktor ini juga sangat berisiko terhadap ancaman penyakit infeksi bagi anak. Untuk itu perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun, dengan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Jika hal ini dijadikan kebiasaan maka anak-anak akan terhindar dari masalah stunting.

Peduli Stunting, Dandim Subulussalam Bersama Ketua Persit Kunjungi Posyandu

REDAKSI
Thursday, May 04, 2023 | Thursday, May 04, 2023 WIB



Gambar 8 Singkilterkini.Net Subulussalam



Wali Kota Subulussalam H Affan Affan Bintang bersama unsur forkopimda, foto bersama usai melaunching program Bapak Asuh Anak Stunting (BAA5) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Senin (13/3/2023) di Desa Lae Gram, Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam

Gambar 9 Serambinewa.com

Informasi di atas, sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Tarmizi S.P selaku ketua satgas percepatan penurunan stunting bahwasanya untuk menanggulangi, mencegah stunting bukan hanya lintas sektor saja namun semua juga bekerja sama untuk menurunkan angka stunting di Kota Subulussalam. Seperti yang sudah disampaikan bapak ketua satgas DP3AKB diatas bahwasanya stunting memiliki BAAS yang dimulai dari Bapak Walikota, Wakil Walikota, Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah turun ke Desa-desa. Ternyata pernyataan yang disampaikan oleh bapak DP3AKB bisa dibuktikan dengan adanya informasi yang ada. Untuk melihat Program ini adalah Gerakan bersama untuk mempercepat penurunan stunting yang akan menyasar langsung keluarga berisiko stunting yang ada di Kota Subulussalam. Untuk melihat nama-nama Bapak Asuh Anak Stunting dalam keputusan Walikota Subulussalam dapat diakses melalui website (<https://bit.ly/3JaLI0r>).

4.4 Tantangan Pemerintah Subulussalam dalam Penanganan *Stunting*

Salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan stunting adalah mengubah cara berpikir masyarakat tentang gizi dan kesehatan anak. Masyarakat harus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari para petugas kesehatan.

Hasil wawancara dengan Bappeda Kota Subulussalam terkait dengan tantangan:

“Terkait dengan koordinasi lintas sektor kadang-kadang memiliki persepsi yang berbeda dari DINKES ada program seharusnya ini ke desa seharusnya inikan peran kecamatan, desa atau instansi terkait misalnya inikan sama-sama pendukung. Tapi kadang-kadang masih ada ego sektoral. Contohnya tugas dinkes ngapain harus kita lakukan. Ini persoalan pertama. Masyarakat menerima program, jadi kadang-kadang masyarakat maunya instan kalau dikasi duit tidak dimanfaatkan dengan baik. Inilah yang menjadi kendala sehingga perlu adanya perubahan perilaku edukasi untuk masyarakat”³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Subulussalam yaitu:

1. Keegoisan lintas sektor

Berdasarkan wawancara dengan dinas Bappeda Kota subulussalam

“Keegoisan ini terjadi karena mereka menganggap tugas penanganan stunting ini menjadi kewajiban dari dinkes”³⁶

Rancangan program dinkes Untuk ibu hamil KEK (Kekurangan Gizi Kronis) diberikan makanan tambahan dari desa dan dari kementerian kesehatan khusus ibu hamil KEK yang beresiko stunting dan ini bukan untuk semua ibu hamil. Setelah hamil akan melahirkan, setelah lahir ada Namanya IMD Imunisasi Menyusui Dini lahir langsung di susuin anaknya. Memberikan Asi Eksklusif untuk bayi dalam waktu 6 bulan dan selama 6 bulan tidak boleh diberikan apa-apa. Setelah 6 bulan ke atas bayi sudah diperbolehkan untuk makan sesuai dengan usianya.

2. Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan dinas DP3AKB Kota Subulussalam

“Kadang-kadang masyarakat Kota Subulussalam mau yang instan saja tanpa proses yang sulit jadi dinas DP3AKB merasa kewalahan menghadapi masyarakat, padahal penurunan stunting ini perlu dilakukan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam, 8 April 2024

³⁶ Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam, 8 april 2024

secara terus menerus agar penanganan stunting cepat diatasi dan cepat penurunannya.”³⁷

Sesuai pernyataan diatas bahwa dinas DP3AKB berusaha secara terus menerus melakukan penanganan stunting di Kota Subulussalam walaupun kesadaran masyarakat Kota Subulussalam tersebut kurang. Dinas DP3AKB berusaha memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu-ibu dan anak-anak yang terindikasi stunting. Selain itu dinas DP3AKB memberikan asupan makanan sehat kepada masyarakat yang terkena dampak stunting. Masyarakat juga diwajibkan mengikuti penyuluhan agar memiliki pengetahuan terkait dengan penting nya penanganan stunting. Dinas DP3AKB juga mewajibkan masyarakat menjaga pola makan serta hidup sehat supaya tidak terindikasi dampak *stunting*.

Upaya dari Dinas DP3AKB untuk terus menerus melakukan penanganan stunting di Kota Subulussalam adalah langkah yang sangat positif. Stunting adalah masalah serius yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Dengan melakukan penanganan yang terus menerus, Dinas DP3AKB dapat memastikan bahwa upaya pencegahan dan intervensi dilakukan secara konsisten dan efektif.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas DP3AKB termasuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting, pemeriksaan kesehatan rutin, serta program-program pendidikan dan perawatan untuk ibu hamil

³⁷ Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P ketua satgas percepatan penurunan stunting, 8 april 2024

dan balita. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga penting untuk meningkatkan efektivitas upaya penanganan *stunting*. Melalui komitmen yang berkelanjutan dan upaya kolaboratif, diharapkan angka *stunting* di Kota Subulussalam dapat dikurangi secara signifikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mencapai potensi yang maksimal untuk keluarga dan anak yang terindikasi *stunting*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan terkait kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting dan tantangan pemerintah Kota subulussalam dalam penanganan *stunting* adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah kota Subulussalam yaitu perencanaan Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah stunting secara langsung. Ini melibatkan pemberian insentif fiskal dan penekanan pada perencanaan yang mendukung koordinasi, tata kelola, intervensi yang sensitif, dan intervensi yang spesifik. Pada tahun 2023, pemerintah kota menargetkan untuk menurunkan angka stunting sebesar 13,02%. Langkah-langkah dalam mencapai tujuan ini meliputi meningkatkan akses bagi ibu hamil, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan stunting. Program implementasi yang dipimpin oleh DP3AKB, dengan fokus pada pencegahan lebih dari pengobatan, termasuk pendataan ibu-ibu Kekurangan Gizi Kronis untuk mencegah lahirnya generasi yang stunting. Program yang menjadi prioritas adalah Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), yang memastikan setiap desa mendapatkan penanganan yang diperlukan. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menangani stunting secara holistik dan menyeluruh.

2. Tantangan pemerintah subulussalam dalam penanganan stunting yaitu bahwa keegoisan terjadi karena masyarakat menganggap penanganan stunting sebagai tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) saja. Masyarakat terkadang menginginkan solusi instan tanpa memperhatikan proses yang sulit. Hal ini membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AKB) merasa kesulitan dalam menghadapi permintaan masyarakat. Namun, penurunan angka stunting memerlukan upaya yang berkelanjutan dan konsisten dari seluruh komponen masyarakat, sehingga perlu adanya kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dan kerjasama antara berbagai pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Filosofinya seperti mencegah lebih baik dari pada mengobati. Orangtua atau keluarga yang mengasuh balita diharapkan untuk selalu rutin membawa balita datang ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan mengetahui sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan pada balita, serta meningkatkan edukasi tentang stunting yang dibuat oleh Pemerintah Kota Subulussalam. Orangtua atau keluarga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan makanan ringan atau minuman yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi kepada anak. Kepada Dinkes diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya memberikan ASI Eksklusif kepada calon orangtua.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor yang paling berisiko menyebabkan stunting pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Anik Lestari, Tahun 2020 *Edukasi Kader Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen* Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Archda, Tahun 2019 *Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia* University of Bangka Belitung.
- Aweq Ampung¹, Adam Idris², Achmad Djumlani³, Tahun 2015 *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Studi Di UPT Pendidikan Muara Bengkal)*
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.143.
- Burhan Bugin, Tahun 2021 *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Ilmu Sosial Lainnya)*, hlm.143.
- Chitra, Tahun 2023 *Disabilitas dan Pemilu 2019 di Aceh Besar*
- Dahlan Tampubolon, Tahun 2020 *Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi* Universitas Riau Pekanbaru.
- Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita
- Hardiyanto Rahman, Tahun 2023 *Upaya Penanganan Stunting di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten*
- Hardiyanto Rahman, Tahun 2023 *Upaya Penanganan Stunting di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten* Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan dalam Negeri.
- <https://www.kemenkopmk.go.id/perlu-terobosan-dan-intervensi-tepat-sasaran-lintas-sektor-untuk-atasi-stunting>
- Ibid*, hlm. 150
- Imam Gunawan, Tahun 2014 *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hlm. 210-211.
- Imelda Natasya, Tahun 2023 *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir di Aceh Tamiang*

Imelda Natasya, Tahun 2023 *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir di Aceh Tamiang*

Liza Nurva, Tahun 2023 *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting; Studi kasus di Kabupaten Brebes* Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang.

Laporan riset dari lembaga-lembaga kesehatan seperti WHO (World Health Organization), UNICEF (United Nations Children's Fund), atau institusi riset kesehatan global dan nasional lainnya.

Moleong, Tahun 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Nasrul Z, Sais Usman, Alfridsyah, tahun 2022 *Prevalensi dan faktor Determinan Kejadian Stunting Pada Siswa Sekolah dasar di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh*

Peraturan Bupati kabupaten aceh jaya Nomor 22 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanggulangan malnutrisi (Stunting dan Gizi Akut) Terintegrasi Kabupaten AjeH Jaya.

Raisuli Ramadhan, Tahun 2023 *Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh*

Raisuli Ramadhan, Tahun 2023 *Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh*

Ririn Mais, Tahun 2019 *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung*

Samsuri, Tahun 2019 *Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan Pembuatan Izin Lingkungan Pada Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Fakfak*

Susianto Hadi, Tahun 2004 *Metodelogi Penelitian Research*, hlm.4.

Tri Rini Puji Lestari, tahun 2023 *Stunting di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Wanda Lestari, Ani Margawati, M. Zen Rahfiluddin, Tahun 2014 *Faktor Risiko Stunting Pada Anak Umur 6-24 Bulan di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh*. Jurnal Gizi Indonesia.

Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan oembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam, 31 maret 2024

Wawancara dengan bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam, 8 april 2024

Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam, 8 april 2024

Wawancara dengan Bapak Fauzi Briansyah kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan keistimewaan aceh bappeda kota subulussalam, 8 april 2024

Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P ketua satgas percepatan penurunan stunting, 15 januari 2024

Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P ketua satgas percepatan penurunan stunting, 15 januari 2024

Wawancara dengan Bapak Tarmizi S.P ketua satgas percepatan penurunan stunting, 8 april 2024

Wawancara Oleh Bapak DP3AKB Kota Subulussalam

World Health Organization (WHO), UNICEF.



PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting?
2. Bagaimana proses kebijakan setelah adanya peraturan walikota yang sudah ditetapkan dan sebelum adanya peraturan tersebut?
3. Program apa saja yang di rancang oleh pemerintah Kota Subulussalam dalam penanganan stunting?
4. Bagaimana implementasi program stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Subulussalam?
5. Apa saja yang tantangan dihadapi pemerintah Kota Subulussalam dalam implementasi program penanganan stunting?
6. Apakah ada terobosan-terobosan khusus dalam penanganan stunting?
7. Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota subulussalam dalam menangani persoalan stunting?
8. Apa saja faktor penyebab stunting di Kota Subulussalam?
9. Apakah ada rekomendasi gizi yang diberikan pihak posyandu kepada pasien
10. Bagaimana pihak posyandu mengatasi pasien yang memiliki masalah gizi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-123/Un.08/FISIP I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH / 200801039**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Syiah kuala Darussalam moeng balee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisa kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah kota subulussalam*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-123/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Wali Kota Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH / 200801039**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Syiah kuala Darussalam inoeng balee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisa kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah kota subulussalam*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-123/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
DP3AKB Kota Subulussalam
Assalamu'alaikum Wr Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYALSHA DILLA ADVINA SARAGIH / 200801039**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Syiah Kuala Darussalam Inoeng Balee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisa Kebijakan penanganan stunting oleh pemerintah kota subulussalam*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Januari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Ar-Raniry Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR - RANIRY



LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI: KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 AR-RANIRY FAKULTAS
AL-ULUM AL-ISLAMIAH
 NO SURAT: B-123/UN.08/FISIP.1/PP.00.01/2024
 TGL SURAT: 7 JANUARI 2024
 NO AGENDA: 031
 SIFAT:
 TGL DITERIMA: 11 JANUARI 2024

PERIHAL: PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA

Diteruskan Kepada Sdr:

- WALIKOTA
- WAKIL WALIKOTA
- SEKRETARIS DAERAH
- ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH
- ASISTEN PERKENOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM
- KABAG PEMERINTAHAN
- KABAG HUKUM
- KABAG KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESK
- KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA
- KABAG ADM. PEMBANGUNAN
- KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA
- KABAG ORGANISASI
- KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
- KABAG UMUM

Dengan Hormat, harap:

- TANGGAPAN DAN SARA
- PROSES LEBIH LANJUT
- KOORDINASI/KOONFIRMA

Sedek!
Mutali lagi
TP 1/1/24

CATATA

TO: Kalir DP > ATB
for Sdika jilid *Sebelum ketetapan TO 7/2024*

FOTO FOTO KEGIATAN PENELITIAN

1. Foto Wawancara dengan DP3AKB Kota Subulussalam



2. Foto Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam



3. Foto Wawancara dengan Orang Tua Pasien Kekurangan Gizi Buruk Kota Subulussalam





RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Syalsha Dilla Advina Saragih
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 September 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Marjanji Dusun 1 Pondok Seng
6. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Alm. Tabrani Saragih
 - b. Nama Ibu : Elminawaty Damanik
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 102117 Gunung Pamela, Tahun 2014
 - b. SMP Negeri 2 Sipispis, Tahun 2017
 - c. SMA Negeri 1 Sipispis, Tahun 2020